



LAPORAN KINERJA

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026



<https://bpkad.sumselprov.go.id>



bpkad_provsumsel



bpkad2.sumselprov@gmail.com



(0711) 5736539

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



BPKAD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

AKHLAK
kepercayaan Akuntabel Kompeten
Korupsi Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja BPKAD Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Di dalamnya tersaji analisis mengenai pencapaian indikator kinerja utama, realisasi anggaran, serta berbagai kendala maupun solusi strategis yang diambil selama Triwulan I.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kinerja di masa mendatang. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam pencapaian target kinerja periode ini.

Kami menyadari bahwa keberhasilan capaian di Triwulan I ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BPKAD dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan strategis untuk mencapai target kinerja yang lebih baik pada triwulan berikutnya.

Palembang, 6 April 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Struktur Organisasi	1
3. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.....	2
BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA	
4. Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja.....	3
a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026	3
b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Per Triwulan	6
c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	8
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Penungkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	11
e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	16
f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	28
5. Realisasi Keuangan	37
6. Upaya Perbaikan terkait Perjanjian Kinerja pada masa yang akan datang	42
BAB III PENUTUP.....	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Organisasi BPKAD Prov. Sumsel	11

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2026	5
Tabel 2.2 LRA Triwulan I Tahun 2026	6
Tabel 2.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja per triwulan.....	7
Tabel 2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah	10
Tabel 2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	14
Tabel 2.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	17
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan ...	18
Tabel 2.8 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan	32
Tabel 2.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	38

BAB I PENDAHULUAN

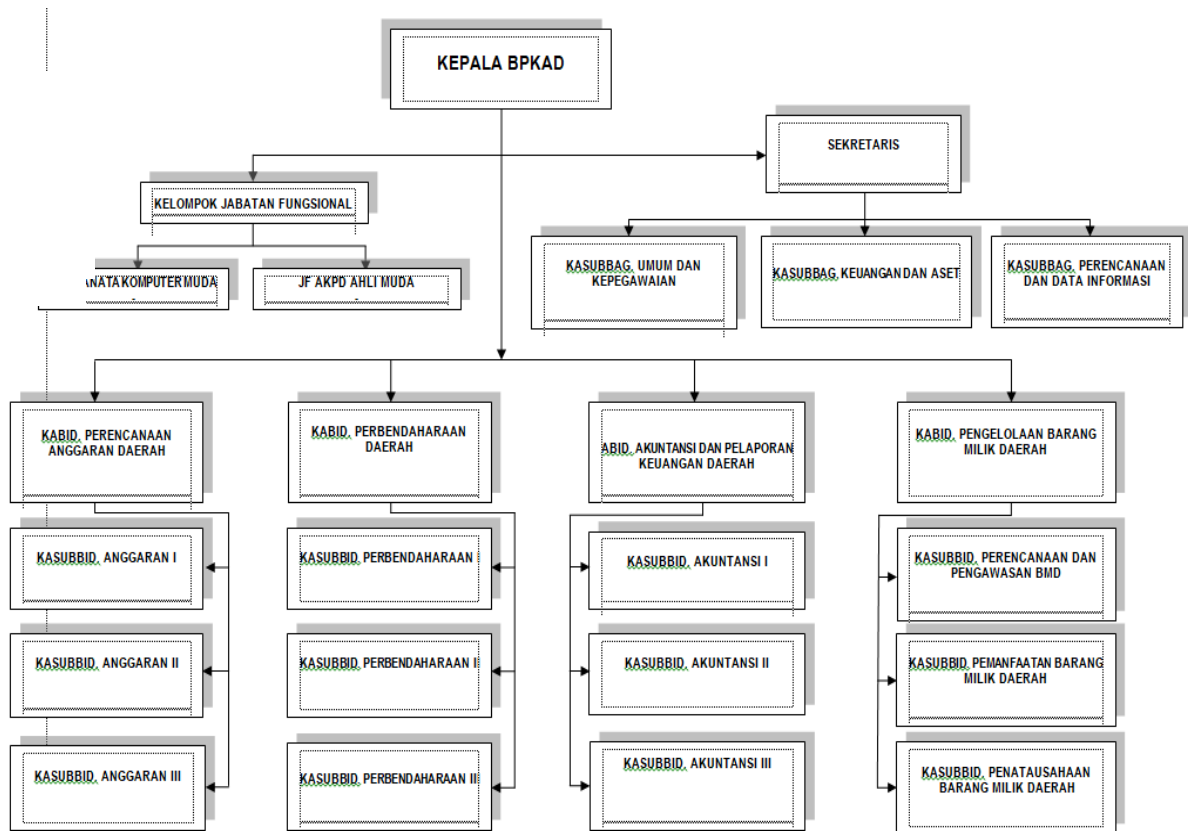
1. Latar Belakang

Laporan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Triwulan I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan transparan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai tolok ukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahunan. Triwulan I sangat penting untuk memetakan langkah strategis, mengidentifikasi hambatan awal, serta memastikan seluruh program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi untuk menjamin bahwa serapan anggaran dan target kinerja fisik tercapai secara optimal sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan



3. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja BPKAD Triwulan I Tahun 2026 adalah :

- a. Memberikan gambaran mengenai sejauh mana BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program BPKAD Provinsi Sumatera Selatan secara transparan, serta mengukur sejauh mana target Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai di awal tahun anggaran.
- c. Sebagai dasar untuk mengambil langkah korektif sejauh mana target-target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan telah tercapai.

BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

4. Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja BPKAD pada Triwulan I Tahun 2026 merupakan representasi dari realisasi rencana aksi yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Adapun target dan realisasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2026 akan diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator : Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan dengan target 100%

- Target dan realisasi Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027

Mengingat saat ini kita berada Triwulan I Tahun 2026, progres penyusunan APBD Perubahan Tahun 2026 masih dalam tahap evaluasi realisasi anggaran semester pertama (Januari-Juni). Pembahasan formal mengenai Perubahan APBD 2026 umumnya baru dimulai pada bulan Juli atau Agustus 2026 setelah Laporan Realisasi Semester I (LRA) disampaikan.

Sejalan dengan hal tersebut, proses penyusunan APBD Induk Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditargetkan paling lambat pada 30 November 2026, guna memastikan dokumen Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2027 dapat ditetapkan sebelum 31 Desember 2026. **Progres Saat Ini** : Masih dalam tahap perencanaan awal melalui penyusunan **RKPD 2027** dan serangkaian Musrenbang.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga siklus anggaran yang transparan. Ketepatan waktu dalam penyusunan **APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2026** dan **APBD Induk Tahun 2027** bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan perwujudan dari tata kelola keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator : *Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)*

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Maret 2026, total penyerapan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp735.307.020.145,00. Jika dibandingkan dengan total pagu Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.497.450.270.236,00, maka persentase serapan pada Triwulan I mencapai 7,74%. Capaian pada triwulan pertama ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih berada dalam persiapan administrasi menuju pelaksanaan program secara keseluruhan.

Sasaran 2 : *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Indikator : *Indeks Pengelolaan Aset*

Target dan realisasi Penyerapan belanja modal sampai dengan triwulan 1 Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp804.766.428.970,00 terealisasi sebesar Rp14.095.686.271,00 atau baru mencapai 1,75%.

Fokus utama pada triwulan ini adalah penyelesaian administrasi **RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)** sebagai instrumen awal penilaian indeks.

Sasaran 3 : *Meningkatnya Tata Kelola OPD*

Indikator : *Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah*

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, BPKAD telah menyelesaikan penyusunan dan pengunggahan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 per 31 Maret 2026. Langkah ini merupakan bagian dari siklus akuntabilitas untuk mengukur efektivitas program penunjang urusan pemerintahan daerah terhadap target Renstra 2025-2029.

Capaian SAKIP pada awal tahun 2026 difokuskan pada penguatan data dukung melalui integrasi sistem digital SIPD RI serta sinkronisasi pohon kinerja (*cascading*) untuk memastikan setiap kegiatan anggaran berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan **tabel 2.1** dibawah bahwa target dan realisasi indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan TA. 2025 pada Triwulan I belum dapat dinilai secara predikat karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Pemerintah Daerah telah memenuhi kewajiban konstitusional dengan menyerahkan **LKPD *Unaudited* TA 2025** kepada BPK Perwakilan pada akhir Maret 2026. Fokus kegiatan pada triwulan ini adalah pendampingan tim pemeriksa dan penyediaan data dukung (*evidence*) untuk mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Tabel 2.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Keterangan
1		2	3	4	5	6	8
1	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	-	Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited
			a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	%	100	-	
			- Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026				Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026
			- Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027				Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
			b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	%	5	-	Deviasi Realisasi Belanja diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran. LRA Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp735.307.020.145,00 atau 7,74% dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.497.450.270.236,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18	-	Indeks Pengelolaan Aset akan diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91	-	Belum ada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Per Triwulan

Realisasi dan Capaian Kinerja atas Laporan Keuangan Hingga Triwulan I Tahun 2026, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mengeluarkan opini resmi atas laporan keuangan periode berjalan karena opini BPK diterbitkan secara **tahunan**.

Adapun target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2026 akan diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator :

1. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Realisasi dan Capaian kinerja pada indikator Penetapan dokumen APBD Induk TA 2027 adalah belum ada capaian atau 0%, karena dokumen tersebut menurut hukum belum memasuki tahap penetapan. Berdasarkan siklus anggaran tahunan, dokumen APBD baru akan ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya (Desember 2026) untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan Capaian penetapan dokumen APBD Perubahan (APBD-P) 2026 secara formal berada juga pada angka 0%. Berdasarkan siklus anggaran yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, pembahasan APBD-P umumnya baru dimulai pada pertengahan tahun anggaran setelah laporan realisasi semester pertama (Januari-Juni) disampaikan.

2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga **31 Maret 2026**, kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
LRA Triwulan I Tahun 2026

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan	
			Target di Akhir Tahun (%)	Realisasi di Bulan ini (%)
Total Belanja	9.497.450.270.236	735.307.020.145	100	7,74%
Belanja Operasi	5.393.904.157.398	697.275.430.334	100	12,93%
Belanja Modal	804.766.428.970	14.095.686.271	100	1,75%
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	-	100	-
Belanja Transfer	3.248.779.683.868	23.935.903.540	100	0,74%

3. Indeks Pengelolaan Aset

Perbandingan realisasi kinerja Realisasi dan Capaian Kinerja pada indikator **Indeks Pengelolaan Aset (IPA)** sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dengan realisasi belanja modal secara umum baru mencapai 1,75%. Adapun kinerja manajerial aset (yang diukur lewat IPA) tidak terganggu secara signifikan karena lebih bersifat penguatan sistem dan tertib administrasi.

4. Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Realisasi dan Capaian Kinerja pada indikator Nilai Sakip adalah bahwa BPKAD telah menyelesaikan penyusunan dan publikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 tepat waktu pada akhir Maret 2026. Dokumen ini menjadi evaluasi bagi Kemenpan-RB dalam menilai sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan tabel 2.3 dibawah akan disajikan realisasi kinerja serta capaian kinerja per triwulan

Tabel 2.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Per Triwulan

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	-	-	Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited
			a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	%	100	-	-	
			- Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026					Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026
			- Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027					Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
			b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	%	5	-	-	Deviasi Realisasi Belanja diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran. LRA Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp735.307.020.145,00 atau 7,74% dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.497.450.270.236,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18	-	-	Indeks Pengelolaan Aset akan diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91	-	-	Belum ada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

c. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Berdasarkan Rancangan Akhir Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029 dan regulasi terkait, target indikator Opini BPK adalah mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target ini selaras dengan Keputusan Gubernur Nomor 872/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Adapun perbandingan **realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis** akan diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target 100% ketepatan waktu penetapan APBD sepanjang periode 2025-2029 sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019. Komitmen ini memastikan seluruh dokumen anggaran disahkan paling lambat tanggal 31 Desember, guna menjamin kesinambungan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah tepat waktu sejak awal tahun anggaran. Capaian ini menjadi indikator utama tata kelola fiskal daerah dalam mendukung visi pembangunan Sumatera Selatan ke depan.

2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)

Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja daerah yang efisien dan akuntabel, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan pengendalian **deviasi realisasi belanja terhadap total belanja APBD** sebagai indikator kinerja utama dalam Renstra 2025–2029. Target akhir periode ini diarahkan pada pencapaian tingkat deviasi sebesar **5%**, yang mencerminkan tingkat perencanaan yang optimal antara arus kas dengan pelaksanaan program kegiatan.

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD terserap secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Penggunaan SIPD RI dalam menjaga konsistensi penyerapan anggaran, guna menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran serta menjamin keberlanjutan fiskal daerah hingga tahun 2029.

3. Indeks Pengelolaan Aset

Dalam upaya mewujudkan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) yang profesional dan berstandar nasional, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan capaian **Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 2,22%** sampai dengan tahun 2029. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk beralih dari penatausahaan administratif menuju manajemen aset yang memberikan nilai tambah (aset produktif).

BPKAD menargetkan peningkatan indeks ini secara berkala hingga tahun 2029 guna mendukung reformasi birokrasi dan predikat opini WTP yang berkelanjutan.

4. Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Melalui mekanisme *cascading* yang tepat dalam Renstra 2025-2029, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah mengidentifikasi dan memangkas kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan pada program prioritas.

Berdasarkan tabel 2.4 menunjukkan perbandingan capaian kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 yang dibandingkan dengan target akhir renstra.

Tabel 2.4

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7	7	7	8
1	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	-	-	WTP	-	Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited
			a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	%	100	-	-	100	-	
			- Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026							Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026
			- Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027							Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
			b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	%	5	-	-	5	-	Deviasi Realisasi Belanja diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran. LRA Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp735.307.020.145,00 atau 7,74% dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.497.450.270.236,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,18	-	-	2,22	-	Indeks Pengelolaan Aset akan diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	91	-	-	91	-	Belum ada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pencapaian utama **BPKAD Provinsi Sumatera Selatan** pada Triwulan I tahun 2026 adalah keberhasilan menyerahkan **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 Unaudited** secara tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Maret 2026.

Penyerahan ini memenuhi amanat UU No. 1 Tahun 2004, yang mewajibkan laporan diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketepatan waktu ini menjadi **syarat mutlak** untuk membangun kepercayaan auditor sejak awal proses pemeriksaan. Hal ini mencerminkan efektifitas koordinasi BPKAD dalam melakukan konsolidasi data keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kesiapan sistem informasi akuntansi yang digunakan serta menunjukkan bahwa mekanisme tutup buku dan rekonsiliasi kas serta aset tetap di akhir tahun 2025 telah berjalan dengan baik meskipun terdapat tantangan transisi sistem digital.

b. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menetapkan Perda APBD 2026 dan Penjabaran APBD 2026 sebelum 31 Desember 2025. Keberhasilan ini memastikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersedia di awal Januari, sehingga belanja rutin (gaji, listrik, air) berjalan tanpa hambatan administratif. Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan **identifikasi dini** untuk APBD Perubahan TA 2026 di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan per Triwulan I adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi pada Triwulan I tahun 2026 untuk memberikan waktu lebih panjang bagi OPD dalam merancang efisiensi tanpa mengganggu pelayanan publik dasar.
- Penggunaan data hasil identifikasi dini dalam sistem SIPD RI memastikan bahwa perubahan postur anggaran memiliki landasan data yang kuat, bukan sekadar perkiraan, sehingga meningkatkan akuntabilitas di mata BPK.

Selanjutnya Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 telah dilakukan sesuai jadwal nasional pada Triwulan I. Ketepatan waktu di tahap awal ini adalah prasyarat utama agar penetapan APBD 2027 pada Desember mendatang tetap mencapai target tepat waktu. Selain itu, Penggunaan sistem yang terintegrasi berhasil mengunci alur waktu penyusunan, sehingga meminimalisir keterlambatan yang disebabkan oleh proses input manual atau pengajuan dokumen di luar jadwal.

- c. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution).

Keberhasilan dalam indikator ini ditunjukkan oleh **nilai deviasi yang semakin kecil (mendekati 0%)** yang berarti realisasi belanja sangat konsisten dengan perencanaan awal dalam APBD.

Faktor Penetapan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada awal Januari 2026 memungkinkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung melakukan penyerapan untuk belanja rutin (listrik, air, internet, dan ATK) tanpa kendala administratif sehingga OPD menyusun jadwal penarikan dana bulanan dengan baik. Hal ini penting agar OPD dapat mengatur arus kas (*cash flow*) dengan baik.

Selain itu, Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi meminimalisir deviasi yang disebabkan oleh kesalahan input atau penolakan sistem saat pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Hal ini mempercepat proses verifikasi di BPKAD.

- d. Indeks Pengelolaan Aset

Serapan belanja modal yang hanya mencapai 1,75% hingga 31 Maret 2026 menghambat penambahan nilai aset tetap baru. Hal ini berisiko menurunkan skor pada indikator Efektivitas Pemanfaatan Aset karena banyak proyek pengadaan yang belum mulai berjalan. Untuk itu, dilaksanakan rekonsiliasi data aset antara pengelola barang dan pengguna barang secara rutin untuk memastikan setiap rupiah yang terserap pada belanja modal langsung terdokumentasi dengan baik dalam sistem informasi aset.

Selain itu, masih ditemukannya aset daerah yang dikuasai pihak ketiga tanpa ikatan hukum yang jelas menjadi poin penting dalam aspek Pengamanan Aset. Kendala ini sering kali menjadi temuan berulang dalam audit BPK yang dapat mendegradasi nilai IPA. Oleh karena itu, dalam penertiban aset bermasalah, selain berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD Provinsi Sumatera Selatan juga meminta bantuan kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)

- e. Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data Triwulan I Tahun 2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan telah mempublikasikan dokumen perencanaan dan pemantauan awal tahun, termasuk DPA Induk TA 2026 per 13 Januari 2026 dan LKJiP BPKAD Tahun 2025 per 31 Maret 2026.

Upaya BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai target nilai SAKIP tahun 2025 berfokus pada integrasi manajemen kinerja yang berbasis teknologi dan penguatan akuntabilitas keuangan seperti **Implementasi SIPD-RI** secara penuh untuk memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja terintegrasi dalam satu sistem yang transparan.

Tabel 2.5 dibawah menunjukkan Analisis keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan.

Tabel 2.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2026			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5			6	7
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	- Keberhasilan utama pada triwulan ini adalah penyerahan LKPD TA 2025 Unaudited tepat waktu pada akhir Maret 2026. Ketepatan waktu ini adalah syarat mutlak untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan bagi BPK.	- Memastikan seluruh Kepala OPD memahami bahwa kredibilitas LKPD adalah tanggung jawab bersama. OPD harus proaktif dalam mengamankan fisik aset yang menjadi sampel pemeriksaan BPK di lapangan.
							- Komitmen dari semua pihak dalam memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern yang pernah ditemukan, sehingga memperkecil risiko temuan berulang.	- Melakukan rekonsiliasi data kas dan aset antara BPKAD dengan seluruh OPD setiap bulan. Ini memastikan perbedaan pencatatan (selisih angka) yang sering menjadi temuan BPK dapat dideteksi dan diperbaiki sejak dini.
							- Penggunaan SIPD RI yang sudah mulai stabil pada tahun berjalan membantu sinkronisasi data belanja dan aset secara otomatis, mengurangi risiko salah saji material yang sering terjadi pada proses input manual.	- Membentuk tim respons cepat di BPKAD yang khusus menangani keluhan teknis penggunaan SIPD RI di seluruh OPD agar hambatan input tidak menjadi alasan keterlambatan laporan.
			Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	-	-	- Untuk APBD Perubahan TA. 2026, Melakukan identifikasi dini terhadap perlunya penyesuaian anggaran. Hal ini dipicu oleh dinamika fiskal berupa penyesuaian dana transfer pusat di awal tahun.	- Gunakan hasil audit BPK atas LKPD 2025 (yang sedang berjalan di TW I) untuk mendapatkan angka SiLPA riil yang dapat digunakan sebagai penambal defisit pada APBD Perubahan
							- Untuk APBD TA. 2027, keberhasilan diukur dari ketepatan waktu tahapan perencanaan. Telah dilaksanakan Musrenbang RKPD 2027 sesuai jadwal nasional. Ketersediaan data usulan pembangunan yang masuk tepat waktu menjadi kunci utama agar penetapan APBD Induk pada Desember 2026 tetap mencapai target 100% tepat waktu.	- Gunakan data realisasi TW I untuk mengevaluasi OPD mana yang kinerjanya rendah; anggaran mereka dapat dialihkan (re-alokasi) ke program yang lebih produktif di APBD Perubahan.
								- Menyusun proyeksi anggaran 2027 yang sudah mengacu pada batasan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), terutama terkait mandatori belanja pegawai (maksimal 30%) dan infrastruktur (minimal 40%).
								- Penguatan Komunikasi dengan Legislatif

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2026			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5			6	7
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	5%	-	-	- Penetapan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada awal Januari 2026 memungkinkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung melakukan penyerapan untuk belanja rutin (listrik, air, internet, dan ATK) tanpa kendala administratif. - Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi meminimalisir deviasi yang disebabkan oleh kesalahan input atau penolakan sistem saat pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Hal ini mempercepat proses verifikasi di BPKAD.	- Mewajibkan OPD menyusun jadwal penarikan dana bulanan dengan baik. Hal ini penting agar OPD dapat mengatur arus kas (cash flow) dengan baik, terutama saat penerimaan dari dana transfer pusat mengalami penundaan. - Melayani konsultasi teknis bagi bendahara OPD terkait kendala sistem di awal tahun anggaran.
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,18%	-	-	- Serapan belanja modal yang hanya mencapai 1,75% hingga 31 Maret 2026 menghambat penambahan nilai aset tetap baru. Hal ini berisiko menurunkan skor pada indikator Efektivitas Pemanfaatan Aset karena banyak proyek pengadaan yang belum mulai berjalan. - Masih ditemukannya aset daerah yang dikuasai pihak ketiga tanpa ikatan hukum yang jelas menjadi poin penting dalam aspek Pengamanan Aset. Kendala ini sering kali menjadi temuan berulang dalam audit BPK yang dapat mendegradasi nilai IPA.	- Melakukan rekonsiliasi data aset antara pengelola barang dan pengguna barang secara lebih rutin (bulanan) untuk memastikan setiap rupiah yang terserap pada belanja modal langsung terdokumentasi dengan baik dalam sistem informasi aset. - Dalam penertiban aset bermasalah, selain berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga meminta bantuan kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan -	91%			- Berdasarkan data Triwulan I Tahun 2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan telah mempublikasikan dokumen perencanaan dan pemantauan awal tahun, termasuk DPA Induk TA 2026 per 13 Januari 2026 dan LKJIP BPKAD Tahun 2025 per 31 Maret 2026.	- Terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai bukti tata kelola keuangan yang bersih, yang merupakan komponen vital dalam penilaian SAKIP.

Data : Rencana Strategis BPKAD TA 2025-2029, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan I Tahun 2026

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian Kinerja yang lebih baik.

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan perhitungan yaitu 100% dikurangi (Realisasi Anggaran dibagi Pagu Anggaran) $\times 100\%$ (sesuai dengan Buku Panduan SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada Tabel 2.6 (Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran) bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai **98,45%**. dan Tabel 2.7 (Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan) diatas, bahwa sampai dengan akhir tahun 2025 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai **99,09%**.

Kegiatan pada triwulan pertama masih didominasi oleh pengeluaran rutin, seperti pembayaran gaji pegawai, serta tagihan operasional kantor (air dan listrik). Dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat maka BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan efisiensi dan menyusun ulang dokumen anggaran. Hal ini menyebabkan penundaan pada sejumlah proyek fisik yang direncanakan sejak awal tahun. Meski terdapat langkah-langkah efisiensi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa program prioritas dan layanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan yang signifikan.

Tabel 2.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=100-10
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-				
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	-	-	4.070.000.000,00	-	0,00	100,00
			Deviasi realisasi belanja terhadap - belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	5%	-	-	1.455.000.000,00	14.813.520,00	1,02	98,98
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	-	-	2.459.000.000,00	127.356.380,00	5,18	94,82
		3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	- Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	91%	-	-	127.641.223.754,00	7.133.348.562,00	5,59	94,41
Rata-Rata Capaian Kinerja									1,55	98,45

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN KEUANGAN														
I	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (91%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	17,88	17,88	127.641.223.754,00	7.133.348.562,00	5,59	94,41
				i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	%	100	36,36	36,36	903.972.000,00	101.054.950,00	11,18	88,82
				1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, LKJIP, Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP, Buku RKA, Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada, Buku DPA, Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan Renaksi)	22	8	36,36	903.972.000,00	101.054.950,00	11,18	88,82
				ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	%	100	21,67	21,67	64.039.604.404,00	5.069.836.162,00	7,92	92,08
				2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	172	83 ASN dan 72 P3K	28,00	62.457.124.404,00	4.884.437.712,00	7,82	92,18

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	60	15	25,00	1.332.480.000,00	155.531.450,00	11,67	88,33
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan (Laporan Keuangan Audit dan Audited, LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD, Rekon Akuntansi/Semester, Dokumen Kartu Kendali/semester, RKBMD, Laporan Rekon Per Triwulan , Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	27	1	12,00	250.000.000,00	29.867.000,00	11,95	88,05
				iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	0,00	0,00	270.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	1	-	0,00	270.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				iv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	10,71	10,71	350.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				6 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen (SKP perbulan dan SKP Tahunan, Anjab, ABK, Evjab, Penataan Arsip Dinamis)	28	6	21,43	250.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	-	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100,00

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	%	100	29,55	29,55	5.412.000.000,00	1.194.507.057,00	22,07	77,93
				8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas)	4	-	35,00	500.000.000,00	164.595.000,00	32,92	67,08
				9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Projektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	1	-	10,00	1.010.000.000,00	60.094.000,00	5,95	94,05
				10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	35,00	1.746.000.000,00	544.535.696,00	31,19	68,81
				11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	-	25,00	832.000.000,00	193.215.340,00	23,22	76,78
				12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	-	25,00	40.000.000,00	7.742.000,00	19,36	80,65
				13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	3	89,67	184.000.000,00	164.996.800,00	89,67	10,33
				14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	400	67	16,75	800.000.000,00	59.328.221,00	7,42	92,58

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi
							Target	Realisasi	Capaian		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				15 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen (Aplikasi : IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Laporan SP4N)	8	-	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				vi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	%	100	0,00	0,00	39.007.048.176,00	0,00	0,00	100,00
				16 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	0,00	39.007.048.176,00	0,00	0,00	100,00
				vii Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	%	100	22,22	22,22	4.579.079.174,00	343.099.788,00	7,49	92,51
				17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	3	25,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	36	9	25,00	1.344.959.174,00	179.448.388,00	13,34	86,66
				19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	2	16,67	3.214.120.000,00	163.651.400,00	5,09	94,91

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	%	100	22,50	22,50	13.079.520.000,00	424.850.605,00	3,25	96,75
				20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit (5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	6	2	35,00	1.380.000.000,00	170.028.805,00	12,32	87,68
				21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	40	8	34,00	288.000.000,00	95.841.800,00	33,28	66,72
				22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	2	20,00	561.520.000,00	59.310.000,00	10,56	89,44
				23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit (Unit Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	4	-	1,00	10.850.000.000,00	99.670.000,00	0,92	99,08
II		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan (100%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	%	100	8,35	8,35	3.305.340.683.868,00	24.160.309.333,00	0,73	99,27	

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	25,95%	26,14%						
						Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	36,60%	27,52%					
						Persentase Penurunan SILPA	%	2,50%	-					
						Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%	-					
				i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	%	100	14,51	14,51	4.070.000.000,00	186.995.309,00	4,59	95,41
				24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	4	-	10,00	372.000.000,00	24.537.809,00	6,60	93,40
				25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen (Raperda, Perda, Rapergub ,Pergub,'Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	34	8	23,53	895.000.000,00	24.357.000,00	2,72	97,28

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				26	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	-	10,00	2.803.000.000,00	138.100.500,00	4,93	95,07
				ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	%	100	3,50	3,50	1.036.000.000,00	22.596.964,00	2,18	97,82
				27	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	34	-	7,00	700.000.000,00	22.596.964,00	3,23	96,77
				28	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan (SK Evaluasi Kab/Kota dan Laporan TPTGR)	18	-	0,00	336.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	%	100	3,41	3,41	670.000.000,00	0,00	0,00	100,00

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				29	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID,TDF)	44	3	6,82	370.000.000,00	0,00	0,00	100,00	
				30	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	179	-	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	100,00	
				iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	%	100	17,50	17,50	785.000.000,00	14.813.520,00	1,89	98,11
				31	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D)	17	-	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	100,00	
				32	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan)	14	-	35,00	435.000.000,00	14.813.520,00	3,41	96,59	

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	%	100	2,83	2,83	3.298.779.683.868,00	23.935.903.540,00	0,73	99,27
				33	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	34	1	2,94	1.716.970.429.335,00	15.000.000.000,00	0,87	99,13
				34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan (Laporan Pencairan)	4	-	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				35	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	18	1	5,56	1.531.809.254.533,00	8.935.903.540,00	0,58	99,42
III		3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (2,18%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	23,23	23,23	2.459.000.000,00	127.356.380,00	5,18	94,82
						Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	6%	-					
						Asset Management	%	100%	-					
				i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	100	23,23	23,23	2.459.000.000,00	127.356.380,00	5,18	94,82

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Indikator Kinerja			Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Efisiensi	
							Target	Realisasi	Capaian	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				36	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	4	1	25,00	330.000.000,00	0,00	0,00	100,00
				37	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan)	61	15	24,59	400.000.000,00	19.687.450,00	4,92	95,08
				38	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian pengelolaan BMD, laporan upaya penertiban BMD bermasalah, RKBMD dan 1 Rekap Gabungan)	76	4	10,00	1.025.500.000,00	79.423.350,00	7,74	92,26
				39	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)	60	20	33,33	703.500.000,00	28.245.580,00	4,02	95,98
Jumlah : 39 sub kegiatan										16,49	3.435.440.907.622,00	31.421.014.275,00	0,91	99,09

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dalam Pencapaian Target Perjanjian Kinerja yaitu mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dengan total anggaran sebesar Rp4.070.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp186.995.309,00 atau 4,59% yang didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dianggarkan sebesar Rp372.000.000,00 terealisasi sebesar Rp24.537.809,00 atau 6,60%.

Sub Kegiatan tersebut merupakan Fondasi awal dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang krusial untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dokumen ini memastikan perencanaan anggaran selaras dengan aturan, realistis, dan transparan. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada RPJMD. Proses koordinasi yang baik memastikan tidak ada program fiktif atau kegiatan yang tidak didukung dokumen perencanaan. PPAS memberikan batas maksimal anggaran untuk setiap kegiatan, mencegah pemborosan atau penganggaran yang tidak terukur yang sering menjadi temuan BPK.

- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp895.000.000,00 terealisasi sebesar Rp24.357.000,00 atau 2,72%.

Sub Kegiatan tersebut merupakan hal utama dalam mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BPK menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika Perda APBD dan Perkada Penjabaran ditetapkan tepat waktu (sebelum 31 Desember), hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang disiplin. Bahwa Proses pembahasan Rancangan Perda (Raperda) bersama DPRD dan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri memastikan anggaran memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dokumen yang telah ditetapkan ini menjadi acuan bagi auditor BPK dalam memverifikasi setiap realisasi belanja pemerintah daerah.

- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dianggarkan sebesar Rp2.803.000.000,00 terealisasi sebesar Rp138.100.500,00 atau 4,93%.

Sub Kegiatan ini fondasi hukum (regulasi) yang memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah memiliki standar yang baku dan sesuai dengan aturan terbaru. BPK akan memberikan opini tidak baik jika daerah masih menggunakan acuan hukum yang sudah kadaluwarsa, karena hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan.

2. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp670.000.000,00 belum ada realisasi atau 0% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp370.000.000,00 belum ada realisasi atau 0%.

Sebagai bendahara umum daerah, BPKAD memverifikasi bahwa setiap pengeluaran kas (penerbitan SP2D) didasarkan pada dokumen pendukung yang lengkap dan sah, serta untuk memastikan bahwa Kas di Kas Daerah yang disajikan dalam Neraca adalah nyata (*existence*), akurat nilainya (*accuracy*), dan dimiliki secara sah (*rights*) oleh pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Melalui pengelolaan kas yang tertib, membuktikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menyajikan posisi kas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memenuhi kriteria kesesuaian SAP dan efektivitas SPI untuk meraih WTP.

- b) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 belum ada realisasi atau 0%.

Sub-kegiatan ini merupakan salah satu prosedur pengendalian intern (SPI) paling penting di BPKAD untuk memastikan laporan keuangan daerah bebas dari salah saji material. Opini WTP sangat bergantung pada kekuatan SPI. Semakin rutin rekonsiliasi dilakukan, semakin kecil risiko kecurangan (*fraud*) atau kehilangan uang daerah yang tidak terdeteksi.

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan total anggaran sebesar Rp785.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.813.520,00 atau 1,89% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 belum ada realisasi atau 0%.

Dalam audit BPK, Sub kegiatan ini adalah penentu utama apakah laporan keuangan layak menyandang opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sub kegiatan ini juga untuk menghindari ketidaksinkronan data antar-laporan yang sering menjadi temuan audit. Rekonsiliasi memastikan seluruh laporan menyajikan angka yang logis dan saling terhubung. BPK memerlukan penjelasan memadai atas setiap kenaikan atau penurunan akun yang signifikan. Verifikasi yang kuat memberikan basis data yang valid untuk narasi di CaLK.

- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dianggarkan sebesar Rp435.000.000,00 belum ada realisasi atau 0%.

Dalam siklus akuntansi daerah, sub-kegiatan ini merupakan akhir dari seluruh proses pelaporan keuangan dalam satu tahun anggaran. Keberhasilan penyusunan Raperda Pertanggungjawaban ini adalah penentu apakah opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan BPK dapat dipertahankan. Sub kegiatan ini adalah proses formalisasi hukum atas laporan keuangan yang telah diaudit. Jika BPKAD mampu menyusun draf regulasi ini dengan akurat, tepat waktu, dan selaras dengan hasil audit BPK, maka opini WTP akan terjaga secara administratif dan hukum.

c) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan total anggaran sebesar Rp2.459.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp127.356.380,00 atau 5,18% yang didukung oleh Sub Kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00 belum ada realisasi atau 0%.

Sub kegiatan ini memiliki peran krusial sebagai alat **pengendalian biaya** yang mencegah terjadinya pemborosan atau penggelembungan harga (*mark-up*). Selain itu, guna memastikan setiap belanja memiliki "patokan harga" yang sah, sehingga laporan keuangan di akhir tahun dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

- b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp19.687.450,00 atau 4,92%.

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam audit BPK, penatausahaan yang tertib adalah syarat mutlak untuk mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) karena aset tetap seringkali menjadi akun dengan nilai material terbesar di Neraca.

- c) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp1.025.500.000,00 terealisasi sebesar Rp79.423.350,00 atau 7,74%.

Sub Kegiatan ini untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola sesuai aturan dan fisik asetnya benar-benar ada, memastikan SKPD disiplin dalam melakukan rekonsiliasi internal antara kartu barang (KIB) dengan catatan akuntansi. Selain itu, memastikan bahwa aset tetap yang biasanya merupakan akun bernilai terbesar di Neraca dikelola dengan transparan, akuntabel, dan patuh hukum. Jika pengawasan lemah, aset menjadi titik yang paling mudah tidak memperoleh opini WTP.

- d) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp703.500.000,00 terealisasi sebesar Rp28.245.580,00 atau 4,02%.

Sub-kegiatan ini memastikan bahwa siklus aset (dari penggunaan hingga penghapusan) terdokumentasi secara hukum dan akuntansi. Hal ini menjamin prinsip Penyajian Wajar di Neraca dan Laporan Operasional, sehingga opini WTP dapat dipertahankan.

Tabel 2.8 menunjukkan Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dalam Pencapaian Target Perjanjian Kinerja yaitu mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 2.8

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Target	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
								Pagu Induk TA. 2026 (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan (100%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	%	8,35	3.305.340.683.868,00	24.160.309.333,00	0,73	Menunjang
			2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%					Menunjang
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%					Menunjang
					Persentase Penurunan SILPA	%					Menunjang
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%					Menunjang
				i Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	%	14,51	4.070.000.000,00	186.995.309,00	4,59	Menunjang
				1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	10,00	372.000.000,00	24.537.809,00	6,60	Menunjang

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
								Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen (Raperda, Perda, Rapergub, Pergub, Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	23,53	895.000.000,00	24.357.000,00	2,72	Menunjang
				3 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	10,00	2.803.000.000,00	138.100.500,00	4,93	Menunjang
				ii Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolannya	%	3,50	1.036.000.000,00	22.596.964,00	2,18	Menunjang
				4 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	7,00	700.000.000,00	22.596.964,00	3,23	Menunjang
				5 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan (SK Evaluasi Kab/Kota dan Laporan TPTGR)	0,00	336.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
				iii Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	%	3,41	670.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
								Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID,TDF)	6,82	370.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
				7 Rekonsiliasi Data dan Rekonsiliasi Data penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspem, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
				iv Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	%	17,50	785.000.000,00	14.813.520,00	1,89	Menunjang
				8 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D)	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
				9 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan)	35,00	435.000.000,00	14.813.520,00	3,41	Menunjang

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	
								Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	%	2,83	3.298.779.683.868,00	23.935.903.540,00	0,73	Menunjang
				10	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	2,94	1.716.970.429.335,00	15.000.000.000,00	0,87	Menunjang
				11	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan (Laporan Pencairan)	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
				12	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	5,56	1.531.809.254.533,00	8.935.903.540,00	0,58	Menunjang
II		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (2,18%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	23,23	2.459.000.000,00	127.356.380,00	5,18	Menunjang
						Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%					Menunjang
						Asset Management	%					Menunjang
				i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	23,23	2.459.000.000,00	127.356.380,00	5,18	Menunjang

No	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Capaian	Target	Realisasi Keuangan	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
								Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	25,00	330.000.000,00	0,00	0,00	Menunjang
				14 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan)	24,59	400.000.000,00	19.687.450,00	4,92	Menunjang
				15 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian pengelolaan BMD, laporan upaya penertiban BMD bermasalah, RKBMD dan 1 Rekap Gabungan)	10,00	1.025.500.000,00	79.423.350,00	7,74	Menunjang
				16 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)	33,33	703.500.000,00	28.245.580,00	4,02	Menunjang
Jumlah : 39 sub kegiatan							16,49	3.435.440.907.622,00	31.421.014.275,00	0,91	

5. Realisasi Keuangan

Total Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp3.435.440.907.622,00** yang terdiri atas :

Belanja Operasi	:	Rp	96.719.175.578,00
Belanja Modal	:	Rp	39.942.048.176,00
Belanja Tidak Terduga	:	Rp	50.000.000.000,00
Belanja Transfer	:	Rp	3.248.779.683.868,00

Perbandingan antara realisasi (keuangan dan fisik) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA.

a. Realisasi Keuangan

- Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0-65% : 38 sub kegiatan.
- Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 1 sub kegiatan.
- Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 91-100% : 0 sub kegiatan

b. Realisasi fisik

- Rendah, Sub Kegiatan dengan realisasi 0-65% : 38 Sub Kegiatan.
- Sedang, Sub Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 1 Sub Kegiatan.
- Tinggi, Sub Kegiatan dengan realisasi 91-100% : 0 Sub Kegiatan

c. Realisasi Belanja Tidak Terduga

Realisasi Keuangan Belanja Tidak Terduga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 beluma ada realisasi atau 0%.

d. Realisasi Belanja Transfer

Realisasi Keuangan Belanja Transfer Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp23.935.903.540,00 atau 0,74%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah pada **Tabel 2.9** sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
				(Rp)	(%)	
1	2	3	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	127.641.223.754,00	7.133.348.562,00	5,59	17,88
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	903.972.000,00	101.054.950,00	11,18	36,36
	1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	903.972.000,00	101.054.950,00	11,18	36,36
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	64.039.604.404,00	5.069.836.162,00	7,92	21,67
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62.457.124.404,00	4.884.437.712,00	7,82	28,00
	3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.332.480.000,00	155.531.450,00	11,67	25,00
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000.000,00	29.867.000,00	11,95	12,00
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	350.000.000,00	0,00	0,00	10,71
	6 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	250.000.000,00	0,00	0,00	21,43
	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	5.412.000.000,00	1.194.507.057,00	22,07	29,55
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	500.000.000,00	164.595.000,00	32,92	35,00

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.010.000.000,00	60.094.000,00	5,95	10,00
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.746.000.000,00	544.535.696,00	31,19	35,00
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	832.000.000,00	193.215.340,00	23,22	25,00
	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40.000.000,00	7.742.000,00	19,36	25,00
	13 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	184.000.000,00	164.996.800,00	89,67	89,67
	14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000,00	59.328.221,00	7,42	16,75
	15 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	39.007.048.176,00	0,00	0,00	0,00
	16 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39.007.048.176,00	0,00	0,00	0,00
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	4.579.079.174,00	343.099.788,00	7,49	22,22
	17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	0,00	0,00	25,00
	18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.344.959.174,00	179.448.388,00	13,34	25,00
	19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.214.120.000,00	163.651.400,00	5,09	16,67
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	13.079.520.000,00	424.850.605,00	3,25	22,50
	20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.380.000.000,00	170.028.805,00	12,32	35,00
	21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	288.000.000,00	95.841.800,00	33,28	34,00
	22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	561.520.000,00	59.310.000,00	10,56	20,00
	23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.850.000.000,00	99.670.000,00	0,92	1,00

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
					(Rp)	(%)	
1	2		3	4	5	6	7
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		<i>Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan</i>	3.305.340.683.868,00	24.160.309.333,00	0,73	8,35
i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		<i>Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending</i>	4.070.000.000,00	186.995.309,00	4,59	14,51
	24	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	372.000.000,00	24.537.809,00	6,60	10,00
	25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	895.000.000,00	24.357.000,00	2,72	23,53
	26	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.803.000.000,00	138.100.500,00	4,93	10,00
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya</i>	1.036.000.000,00	22.596.964,00	2,18	3,50
	27	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	700.000.000,00	22.596.964,00	3,23	7,00
	28	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	336.000.000,00	0,00	0,00	0,00
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		<i>Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi</i>	670.000.000,00	0,00	0,00	3,41
	29	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	370.000.000,00	0,00	0,00	6,82
	30	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		<i>Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD</i>	785.000.000,00	14.813.520,00	1,89	17,50

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Pagu Induk TA. 2026 (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
				(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	31 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	32 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	435.000.000,00	14.813.520,00	3,41	35,00
v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	3.298.779.683.868,00	23.935.903.540,00	0,73	2,83
	33 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.716.970.429.335,00	15.000.000.000,00	0,87	2,94
	34 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	35 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.531.809.254.533,00	8.935.903.540,00	0,58	5,56
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.459.000.000,00	127.356.380,00	5,18	23,23
i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	2.459.000.000,00	127.356.380,00	5,18	23,23
	36 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	330.000.000,00	0,00	0,00	25,00
	37 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	400.000.000,00	19.687.450,00	4,92	24,59
	38 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.025.500.000,00	79.423.350,00	7,74	10,00
	39 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	703.500.000,00	28.245.580,00	4,02	33,33
Jumlah : 39 sub kegiatan			3.435.440.907.622,00	31.421.014.275,00	0,91	16,49

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan I TA.2026

6. Upaya Perbaikan terkait Perjanjian Kinerja pada masa yang akan datang

a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Upaya perbaikan untuk memastikan Penetapan Dokumen APBD Tepat Waktu (sebelum 31 Desember) sangat penting dalam mempertahankan opini WTP, karena keterlambatan sering dianggap sebagai kelemahan serius dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI). Upaya perbaikan tersebut meliputi :

1. Mengoptimalkan penggunaan **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)** untuk mengunci jadwal (tahapan) secara otomatis.

Memastikan seluruh data input dari SKPD dilakukan sebelum batas waktu sistem ditutup (*deadline locking system*) yang bertujuan menghindari penundaan akibat proses input manual atau perubahan anggaran di luar jadwal yang telah disepakati.

2. Penguatan Fungsi TAPD dalam *Time Management*

Menyusun Kalender Anggaran yang menetapkan target penyampaian KUA-PPAS dan Raperda APBD kepada DPRD yang bertujuan memberikan ruang waktu untuk proses pembahasan dengan DPRD dan evaluasi oleh Kemendagri.

3. Komunikasi Intensif dan Pra Pembahasan dengan DPRD

Melakukan **Pra-pembahasan** informal atau konsultasi rutin dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum dokumen resmi diserahkan yang bertujuan menyelaraskan persepsi terkait program prioritas dan kemampuan fiskal daerah sehingga meminimalisir perdebatan yang berkepanjangan saat sidang resmi.

4. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Proses evaluasi oleh Kemendagri sering memakan waktu jika banyak catatan oleh karena itu diperlukan kerjasama semua pihak guna percepatan tindak lanjut hasil evaluasi sehingga penetapan Perda APBD tidak terhambat oleh hambatan administratif pasca evaluasi.

b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)

Upaya perbaikan deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) oleh BPKAD, yang sangat penting untuk pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, berfokus pada **percepatan penyerapan anggaran secara konsisten sepanjang tahun** agar tidak menumpuk di akhir tahun (akhir tahun anggaran) dan mengurangi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Berikut adalah langkah-langkah perbaikan strategis guna mempertahankan WTP untuk memastikan deviasi belanja tetap rendah melalui:

1. Perbaikan Kualitas Perencanaan Anggaran dengan mendorong OPD menyusun Anggaran Kas yang mencerminkan jadwal riil pelaksanaan kegiatan untuk memperkecil selisih (*deviasi*) antara rencana dan realisasi.
2. Memastikan perencanaan belanja barang dan belanja modal sesuai dengan target penyerapan, terutama untuk kegiatan fisik yang berisiko lelang terlambat.
3. Penggunaan e-katalog untuk mempercepat pengadaan barang/jasa tanpa tender, sehingga mempercepat serapan anggaran.
4. Mengadakan rekonsiliasi data belanja antara BPKAD dan OPD secara rutin untuk memastikan akurasi data penyerapan.

Dengan memperkecil deviasi, pemerintah daerah menunjukkan perencanaan yang baik, yang merupakan salah satu poin dalam penilaian WTP.

c. Indeks Pengelolaan Aset

Upaya perbaikan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK difokuskan pada peningkatan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih tertib administrasi, fisik, dan hukum. Berikut adalah beberapa upaya perbaikan pengelolaan aset untuk mendukung WTP :

1. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset (inventarisasi) secara berkala dan akurat untuk memastikan seluruh aset tercatat dalam laporan keuangan.
2. Memastikan nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan adalah nilai yang akurat.
3. Mengamankan aset fisik melalui sertifikasi tanah dan pengamanan hukum aset lainnya untuk menghindari sengketa yang dapat mempengaruhi opini WTP.
4. Menggunakan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mendokumentasikan mutasi aset, hibah, dan kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.
5. Memaksimalkan penggunaan aset tetap agar memberikan nilai tambah dan meminimalisir *idle asset*.
6. Menerapkan metode penyusutan (metode garis lurus) secara tepat untuk mencerminkan penurunan nilai manfaat aset dalam laporan keuangan.
7. Melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan pendampingan tenaga ahli untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan aset.

BAB III

PENUTUP

Meskipun tantangan fiskal pada Triwulan I Tahun 2026 cukup signifikan akibat penyesuaian dana transfer, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tetap menempatkan tata kelola keuangan yang akuntabel sebagai prioritas utama. Seluruh langkah penyerapan anggaran yang telah direncanakan tetap berjalan prinsip transparansi demi menjaga kesinambungan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih berturut-turut. Kinerja organisasi pada Triwulan I ini menjadi dasar evaluasi penting untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yaitu :

- a. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen dalam menjaga pengelolaan APBD yang tepat waktu, mulai dari tahap penatausahaan hingga pelaporan.
- b. Meskipun secara nominal angka serapan baru mencapai 7,74%. Adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyesuaian anggaran. Karena adanya perubahan postur anggaran akibat kebijakan pusat, dokumen anggaran harus dibahas kembali bersama pihak legislatif, yang secara otomatis menghambat pelaksanaan program di lapangan.
- c. Secara keseluruhan, pengelolaan aset pada Triwulan I tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Fokus pada Triwulan II adalah meningkatkan efisiensi penggunaan aset untuk mendorong capaian kinerja organisasi yang lebih baik

Demikian Laporan Kinerja Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi selama periode Januari hingga Maret 2026. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai landasan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Palembang, 6 April 2026



Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	